

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas dan memuat rancangan prioritas pembangunan bidang Perhubungan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan (Dinhub), yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten maupun dari anggaran Pemerintah Propinsi (Bantuan Gubernur).

Substansi Renja OPD setidaknya memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, yaitu Renja tahun 2017, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 serta Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga tahun 2019.

Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu **“ Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**. Visi tersebut diyakini mengakomodir tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Pembangunan bidang Perhubungan dilakukan melalui misi ke-6, yaitu : *“Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai”*. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi Prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan pemukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Atas dasar Visi dan Misi tersebut selanjutnya telah dikembangkan kebijakan pembangunan bidang Perhubungan, yang

diharapkan dapat dijadikan tumpuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu :

“Peningkatan pemenuhan sarana prasaranan utama dan penunjang angkutan jalan serta mendukung pembukaan akses transportasi udara”

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

## **C. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga adalah untuk :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan, Prioritas dan Plafon anggaran Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga tahun anggaran 2019
3. Menjadi acuan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2018
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya pembangunan.

#### **D. SISTEMATIKA RENJA DINAS PERHUBUNGAN**

- I. Pendahuluan  
Memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sistematika penyusunan Renja Dinhub Tahun 2019.
- II. Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Tahun 2017
- III. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018
- IV. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019
- V. Penutup

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017**

**A. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2017 dan Capaian Renstra Tahun 2017**

**1. Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2017**

**Tabel III.1 :  
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2017**

	<b>JENIS PENDAPATAN</b>	<b>TARGET ( Rp. )</b>	<b>REALISASI ( Rp. )</b>	<b>( % )</b>
1.	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum.	<b>1.571.685.000</b>	<b>1.616.027.000</b>	<b>102.82</b>
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	<b>700.000.000</b>	<b>628.034.660</b>	<b>89.72</b>
3.	Retribusi Terminal :			
	a. Terminal Bukateja.	<b>71.496.000</b>	<b>69.460.540</b>	<b>97.15</b>
	b. Terminal Kejobong.	<b>28.800.000</b>	<b>27.462.000</b>	<b>95.35</b>
	c. Terminal Kutabawa.	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.500</b>	<b>50.01</b>
	d. Terminal Kutasari	<b>19.440.000</b>	<b>19.827.000</b>	<b>101.99</b>
	e. Terminal Jompo	<b>14.400.000</b>	<b>18.038.135</b>	<b>125.27</b>
	f. Terminal Penaruban	<b>5.544.000</b>	<b>6.044.000</b>	<b>109,02</b>
4.	Retribusi Ijin Trayek.	<b>160.000.000</b>	<b>118.155.000</b>	<b>73.85</b>
		<b>2.579.365.000</b>	<b>2.507.048.865</b>	<b>97.20</b>

Lebih rinci mengenai realisasi PAD 2017 dapat dilihat pada lampiran.

Dari target PAD yang ditetapkan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. **2.579.365.000,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **2.507.048.865,-** atau tercapai **97.20%**. Dengan kata lain perolehan PAD tersebut tercapai kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 2.8%, hal ini dikarenakan tidak tercapainya perolehan PAD dari retribusi terminal, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi Ijin Trayek.

## 2. Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2017

Guna mencapai tujuan dan prioritas sasaran tersebut pada tahun 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 3 (Tiga) program utama dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. Rp. 50.477.449.000,- ( Lima Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), terdiri dari :

- 1) **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 3.515.247.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.385.121.301,- terdapat selisih sebesar Rp. 130.125.699,- terdiri dari Gaji pegawai sebesar Rp. 86.428.243,- Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp. 39.459.500,- dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.237.956,-
- 2) **Belanja Langsung** sebesar Rp. 46.962.202.000,- dengan realisasi sebesar Rp.45.087.628.688,- atau sebesar 96,01%, terdapat selisih dan atau efisiensi sebesar Rp.1.874.743.312,-

Secara rinci realisasi Belanja langsung dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel III.2 :**  
**Realisasi Anggaran**

PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2		3	4	5	6
Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	810.941.000	760.421.604	93.77
	2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	157.250.000	154.937.917	98.53
	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	344.180.000	315.087.076	91.55
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	491.975.000	450.114.400	91.49
	5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	69.880.000	68.000.000	97.31

<b>PROGRAM</b>		<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
2		3	4	5	6
	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	55.000.000	35.475.000	64.5
	7	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000	9.952.500	99.53
Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	Pengelolaan Kebersihan Terminal	169.308.000	156.976.000	92.72
	2	Operasi Teknis Laik Jalan	24.000.000	22.246.000	92.69
	3	Pengadaan Bahan Pengecatan PKB	15.000.000	15.000.000	100.00
	4	Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kendaraan Bermotor	50.000.000	49.910.500	99.82
	5	Fasilitasi Pembangunan Bandara	100.000.000	92.618.553	92.62
	6	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara	14.969.900.000	14.886.766.200	99.44
	7	Penyusunan Tataran Transportasi Lokal	350.000.000	268.480.000	76.71
	8	Pembinaan Awak Angkutan	180.000.000	167.939.200	0.00
Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	1	Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	250.000.000	249.908.643	99.96
	2	Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light	150.000.000	149.732.000	99.82
	3	Fasilitasi Forum LLAJ	20.000.000	17.394.000	86.97
	4	Pembinaan Perparkiran	120.000.000	120.000.000	100.00

PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2		3	4	5	6
	5	Pengadaan Perlengkapan Jalan	1.174.398.000	1.127.982.250	96.05
	6	Fasilitasi Tim Andalalin	10.000.000	3.164.000	31.64
	7	Pemeliharaan Rutin LPJU	1.160.370.000	1.139.559.845	98.21
	8	Pemasangan LPJU Bobotsari – Karangreja	1.700.000.000	1.419.265.500	83.49
	9	Pemasangan LPJU Jompo – Purbalingga	1.000.000.000	831.375.250	83.14
	10	Pengadaan dan Pemasangan LPJU	1.175.000.000	1.168.612.500	99.46
	11	Pembangunan Lampu PJU Tenaga Surya Kab. Pbg (Ban Gub)	21.105.000.000	20.314.677.850	96.26
	12	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jl. Jend. Sudirman Barat dan A Yani	1.300.000.000	1.094.031.900	84.16

### 3. Capaian Rentra Dinas Perhubungan Tahun 2017

Hingga akhir tahun 2017 Dinas Perhubungan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu " Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan " , dengan sasaran strategisnya : Terwujudnya sarana prasarana Perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas

Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran tersebut tersaji dalam matrik dibawah ini, yaitu :

**Tabel III.3 :**  
**Rata-rata Capaian Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2017**

NO	SARPRAS PERHUBUNGAN YANG MEMADAI	KONDISI IDEAL (2016-2021)	TARGET 2017	REALISASI 2017	PERSENTASE
1	- Marka Jalan	888.087	750	995	132.6
2	- Rambu Standar	1.000	50	100	200
3	- RPPJ	200	5	6	120
4	- Safety Mirror	50	0	0	0
5	- Guard Rail	3500	400	100	25
6	- Traffic Light	14	2	1	50
7	- Warning Light	50	2	4	200
8	- Road Barrier	200	10	0	0
9	- Traffic Cone	399	50	100	200
10	- Paku Marka	4000	250	325	130
11	- Halte	35	0	0	0
12	- LPJU	3600	500	797	159.4
13	- Terminal	10	0	0	0
				Rata-rata	<b>93.6%</b>

**Table.4**  
**Capaian Kinerja Rentra Secara Keseluruhan sampai dengan tahun 2017**

NO	SARPRAS PERHUBUNGAN	KONDISI IDEAL (2016-2021)	REALISASI SAMPAI DENGAN 2017	\ PERSENTASE
1	- Marka Jalan	25.000	2995	11.98
2	- Rambu Standar	1000	200	20
3	- RPPJ	200	12	6
4	- Safety Mirror	50	6	12
5	- Guard Rail	3500	580	16.6
6	- Traffic Light	14	2	14.2
7	- Warning Light	50	8	16
8	- Road Barrier	200	45	22.5
9	- Traffic Cone	399	325	81.4
10	- Paku Marka	4000	100	2.5
11	- Halte	35	6	17.1
12	- LPJU	3600	797	22.1
13	- Terminal	10	0	0
			<b>Rata-rata</b>	<b>18,65%</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa kondisi sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2017 sudah terpenuhi sebanyak 18,65% dari keseluruhan yang dibutuhkan



Meskipun tingkat capaian kinerja dari sasaran masuk dalam kategori “*baik*” ,namun dalam pelaksanaan masih menemui beberapa permasalahan, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran pengusaha atau pemilik angkutan untuk memperbaharui kendaraan dan tidak memperpanjang ijin trayek, sehingga banyak angkutan yang mangkrak/tidak beroperasi;
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, khususnya untuk PPNS LLAJ, staf teknis administrasi maupun tehnik dibidang perhubungan yang menguasai tehnik APILL, LPJU dan tehnik bangunan (konstruksi)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik tehnik administrasi maupun tehnik bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL dan LPJU
2. Membuat evaluasi standar operasional pelayanan perijinan trayek dan pengujian kendaraan bermotor dan Bersurat kepada para pengusaha atau pemilik kendaraan untuk melakukan perpanjangan ijin trayek atau memperbaharui ijin trayek

**BAB III**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018**

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga,, Dinas Perhubungan menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu : " Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 2 (dua) prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017, yaitu :

1. Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas

Tujuan dan sasaran tersebut dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

Adapun Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
2. Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dari ketiga program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

Tabel 5  
Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Peramgkat Daerah</b>	<b>2,199,300,000</b>
1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	813,300,000
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	140,000,000
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	500,000,000
4	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	66,000,000

5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20,000,000
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	10,000,000
7	Pembuatan Gudang	650,000,000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>15,763,557,000</b>
1	Pengelolaan Kebersihan Terminal	162,000,000
2	Operasi Teknis Laik Jalan	20,000,000
3	Pengadaan Bahan Pengecatan PKB	15,000,000
4	Pengadaan Tanah Perluasan Bandara	14,363,357,000
5	Pemeliharaan Terminal Tipe C	400,000,000
6	Revitalisasi peralatan PKB	210,000,000
7	Penyusunan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	200,000,000
8	Pembinaan dan monitoring angkutan	133,000,000
9	Fasilitasi Pembangunan Bandara	75,000,000
10	Mudik Lebaran Gratis	70,200,000
11	Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	50,000,000
12	DED Terminal Kutasari	50,000,000
13	Fasilitasi pemilihan pelajar pelopor dan sopir teladan	15,000,000
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas</b>	<b>18,592,790,000</b>
1	Pembangunan Halte	310,000,000
2	Pengamanan Lalu Lintas & Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal & Tahun Baru	226,300,000
3	Pembinaan petugas parker	180,000,000
4	Fasilitasi Forum LLAJ	20,000,000
5	Fasilitasi penilaian Wahana Tata Nugraha	0
6	Fasilitasi Tim Andalalin	17,500,000
7	Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	2,223,193,000
8	Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	150,000,000
9	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	1,438,163,000
10	Pengadaan dan Pemasangan LPJU	3,467,832,000
11	Pengadaan dan Pemasangan LPJU (bangub)	10,279,802,000
12	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kalipacur	280,000,000
	<b>J U M L A H</b>	<b>36,555,647,000</b>

**BAB IV**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**TAHUN 2018**

**I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten**

**Tabel 6 :**  
**Telaah Renstra Kementerian Perhubungan :**

No	Sasaran Jangka Menengah Kemenhub	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi masih belum memadai	Masih rendahnya kondisi prasarana jalanakibat	Rencana pengadaan/ penambahan fasilitas perlengkapan jalan
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan moda transportasi massal		Perencanaan angkutan umum massal koridor BRT, Reaktifasi Jalur Kereta Api, Pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman

**I. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan**

Pembangunan bidang Perhubungan dilakukan melalui misi ke-6, yaitu : *" Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai"* Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang

memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi Prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan pemukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah : "Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan". dengan indikator kinerja, yaitu Presentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

**Tabel 7 :**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah  
DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016 - 2021**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1.	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan	Terwujudnya sarana dan prasaranan perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas	Presentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Peningkatan Kualitas, kuantitas perlengkapan jalan dan pengelolaan perparkiran	Meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan perlengkapan jalan serta pelayanan perparkiran
				Peningkatan kualitas dan kwantitas awak angkutan umum	mendukung Reaktifasi Jalur Kereta api, pengadaan tranportasi massal dan pembukaan akses transportasi udara

**II. Program dan Kegiatan**

Dinas Perhubungan memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri 3 (tiga) program sebagai berikut:

1. Program penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Program Peningkatan manajemen Fasilitas Lalu Lintas
3. Program Peningkatan pelayanan Angkutan

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu :

**1. Program penguatan kelembagaan daerah,** dengan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Bahan dan Jasa perkantoran
- 2) Rapat koordinasi dan konsultasi
- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 4) Pengadaan Sarana dan prasarana Kantor
- 5) Pendidikan dan pelatihan pegawai
- 6) Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
- 7) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

**2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,** dengan kegiatannya :

- 1) Pengelolaan Terminal
- 2) Pembangunan dan rehabilitasi terminal
- 3) Penertiban dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan
- 4) Perencanaan dan Pembinaan Angkutan
- 5) Pengelolaan PKB

**3. Program Peningkatan manajemen Fasilitas Lalu Lintas,** dengan kegiatannya :

- 1) Pengadaan fasilitas perlengkapan Jalan
- 2) Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
- 3) Perencanaan dan Pengaturan Lalu Lintas
- 4) Penataan dan Pengelolaan Parkir
- 5) Pengadaan dan Pemasangan LPJU
- 6) Pemeliharaan LPJU

Secara rinci program dan kegiatan Rencana Kerja 2019 tersaji dalam matrik di bawah ini :

**PROGAM DAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KAB.PURBALINGGA  
TAHUN 2019 dan PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020**

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Rencana Tahun 2019			KET	Prakiraan Maju Tahun 2020		OPD Pengampu	
				Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja (Output)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya system akuntabilitas SKPD</li> <li>- Presentase pelaksanaan kegiatan OPD tepat waktu</li> <li>- Presentase realisasi anggaran OPD</li> </ul>	100 %	1	Pengadaan bahan dan jasa kantor	856,000,000	94 pegawai, honor pengelola keuangan, honor ptt SK. Bupati (13 orang), listrik, telpon, cetak buku dan plat uji, makan minum rapat, Dinas Perhubungan		100%	856,000,000	
			100%	2	Rapat-rapat koordinasi	175,000,000	506 kegiatan		100%	175,000,000	

			100%	3	Pemeliharaan sarana dan prasaran perkantoran	507,100,000	7 gd, 8 kend roda 4, 20 kend roda 2, peralatan ktr (komputer, laptop, printer, mesin tik), meja kursi, perbaikan 3 unit kendaraan operasional (pengecatan)		100%	490,000,000	
		• Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor	100 %		Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	654,950,000	Meja kerja 1/2 biro 15 unit, meja kursi tamu 1 set, kursi kerja kepala dinas 1 unit, kursi kerja/ rapat 50 unit, lemari penyimpan arsip 4 unit, timbangan portabel 1 unit, hidrolyc garage 10 ton 1 unit, AC 4 unit, laptop 2 unit, komputer PC 3 unit, printer 5 unit,		100%	679,950,000	
		• Terpeliharanya prasarana dan	100%	5	Diklat pegawai	55,000,000	Diklat PPNS 1 Orang dan Diklat Teknis Perhubungan		100%	55,000,000	



		sarana kantor								
		• Terlaksananya diklat/bimtek pegawai	100%	6	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	85,450,000	PDH 95 stel		100%	93,120,000
		• Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan public	100%	7	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja	15,000,000			100%	15,000,000
2	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	Jumlah Awak angkutan	75,600	1	Perencanaan dan Pembinaan Angkutan	310,000,000	900		75,600	45,000,000
		Jumlah Kendaraan yang diuji		2	Pengelolaan PKB	170,000,000	16.700 kendaraan			25,000,000
		Jumlah Terminal	8,589,186	3	Pemeliharaan Terminal	170,000,000	6 terminal		8,589,186	110,000,000

		Jumlah Terminal		4	Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal	650,000,000	2 terminal			600,000,000	
		Jumlah operasi laik jalan		5	Penertiban dan Pengendalian LLAJ	154,000,000	12 kegiatan				
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas</b>	Tersedianya : Marka jalan Rambu Standar RPPJ Guardrail , Traffic Light warning light traffic cone paku marka road barrier	9,855	1	Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	1,850,000,000	5 unit WL, 2 unit TL, 3250 m2 marka, 3 RPPJ, 50 TC, 50 Rambu standar, 500 paku jalan, 180 m pagar		9,855	1,967,200,000	
		Jumlah Traffic Light dan Warning Kight		2	Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	200,000,000	1 paket				
		Jumlah LPJU		3	Pemeliharaan LPJU	1,550,000,000	7187 Titik				
		Jumlah LPJU Terpasang		4	Pengadaan dan Pemasangan LPJU						
		Jumlah Pengamanan dan penertiban Lalu Lintas		5	Perencanaan dan Pengaturan Lalu Lintas	427,500,000	79 keg				

		Jumlah Petugas Parkir		6	Penataan dan Pengelolaan Parkir	370,000,000	360 petugas parkir				
JUMLAH						8,200,000,000				5,111,270,000	

## BAB IV P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga tahun 2019, seluruh pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja Tahun 2019 merupakan acuan bagi Dinas Perhubungan dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan termasuk masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang terutang dalam Renja tahun 2019 dengan sebaik-baiknya
2. Renja Tahun 2019 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2019.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan
4. Pada akhir tahun anggaran 2019, setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2019 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Renja tahun 2019 tersebut dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran, oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sangatlah diperlukan.

Akhirnya, semoga cita-cita menggapai *zero accident* dan transportasi yang lancar, tertib, aman, nyaman dan selamat dapat terwujud.

Pubalingga                      Juli 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



**R. IMAM WAHYUDI, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630418 198903 1 006

